

Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage, Dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Sosial Dan Lingkungan

Nurnika Asri Dewi ¹⁾

IAIN Surakarta

ARTICLES INFORMATION



Journal of Islamic Finance
and Accounting

Vol. 2 No. 2
Juni -November 2019
pp: 39-62

Department of Sharia
Accounting, Faculty of
Islamic Economics and
Business, IAIN Surakarta

*Keywords: Social and
Environment Disclosure
Index (SEDI), corporate
governance, profitability,
leverage*

*JEL Classification: Q56,
C12, G23, G32, G38,
O16*

Abstract

This study aims to analyze the effect of corporate governance, profitability, and leverage on social and environmental disclosure. The data in this study are 40 property, real estate, and building construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2014-2016, so there are 120 observational data. The hypothesis in this study was tested using multiple linear regression analysis with the application of SPSS version 23. The results of this study indicate that institutional ownership, audit committee, and leverage have an effect on social and environmental disclosure. Meanwhile, the independent board of commissioners and profitability has no effect on social and environmental disclosure.

PENDAHULUAN

Persaingan bisnis di era globalisasi mendorong perusahaan untuk bisa tetap hidup (*sustain*) dari segala tantangan yang mereka hadapi. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan adalah tantangan untuk tetap memperoleh keuntungan atau laba (Elkington, 1998). Dengan tetap menghasilkan laba, perusahaan akan dinilai layak untuk mendapatkan investasi. Dengan demikian, laba perusahaan merupakan aspek terpenting dalam menilai keberhasilan perusahaan.

Selain melihat dari sisi keuntungan atau laba, investor juga harus melihat dari sisi sosial dan lingkungan. Pentingnya investor melihat kondisi sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan yaitu untuk memastikan bahwa sumber daya (alam dan manusia) yang dibutuhkan perusahaan masih tetap tersedia (Singhania &

Corresponding author:

¹⁾ [asridewi21@gmail](mailto:asridewi21@gmail.com)

Gandhi, 2015). Oleh karena itu, tanggung jawab perusahaan tidak hanya menghasilkan laba bagi investor tetapi juga harus berpijak pada *triple bottom lines*, yang terdiri dari 3P yaitu *planet* (lingkungan), *people* (masyarakat), dan *profit* (keuntungan) (Elkington, 1998).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk upaya perusahaan untuk melaksanakan prinsip *triple bottom lines*. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan dalam CSR diarahkan untuk perbaikan kondisi masyarakat dan lingkungan. Contohnya yaitu pemberian beasiswa, pelatihan, dan penanaman pohon. Melalui kegiatan CSR perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, sehingga dapat meningkatkan *image* perusahaan (Susanto & Subekti, 2012).

Selain perusahaan diwajibkan untuk melakukan kegiatan CSR, perusahaan juga perlu melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Hal ini dimaksudkan agar para pemangku kepentingan dapat mengetahui informasi mengenai upaya perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Pelaporan kegiatan sosial dan lingkungan biasanya diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan atau dalam *Sustainability Report* (Kuzey & Uyar, 2016).

Pelaksanaan kegiatan CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Selain itu, berdasarkan dari Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 dan 34 disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan terakhir adalah pencabutan izin kegiatan (Cahyaningsih & Martina, 2011).

Praktik pelaporan CSR di Indonesia masih sangat rendah. Pada tahun 2016, perusahaan *Non-Government Organization* (NGO) dari Skotlandia, RobecoSAM merilis hasil penelitiannya mengenai pengungkapan sosial dan lingkungan negara-negara di dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 56 dari 62 negara (RobecoSAM, 2016).

Sementara itu, pada tahun 2016 di Bali, NGO asal Singapura yaitu Pinnacle GNP International menyelenggarakan *Global CSR Awards*. Beberapa Perusahaan asal Indonesia yang masuk diantaranya PT Samsung Electronics Indonesia, PT Jawa Power, PT Indosat, PT Pertamina, PT Adaro, PT Djarum, PT Xl Axiata, PT Bank CIMB Niaga, Bank Indonesia, Sari Husada Generasi Mahardika (CSR Indonesia, 2016). Dari beberapa perusahaan

yang masuk dalam nominasi tersebut, perusahaan dari sektor *property, real estate, dan konstruksi bangunan* masih belum masuk dalam nominasi.

Sedangkan pada NGO asal Indonesia, yaitu NCSR juga menyelenggarakan *International Sustainability Reporting Awards (ISRA)*. Dalam acara penghargaan tersebut perusahaan yang masuk nominasi didominasi oleh sektor perbankan. Terdapat 2 dari 61 perusahaan *real estate* yang masuk dalam nominasi ISRA yaitu PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya (National Center for Sustainability Reporting, 2016). Fenomena-fenomena tersebut mengindikasikan bahwa minat pengungkapan sosial dan lingkungan di Indonesia terutama pada perusahaan *property, real estate, dan konstruksi bangunan* masih rendah.

Beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi luas pengungkapan adalah faktor pertama yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau badan (Karima, 2014). Investor institusional dapat berfungsi sebagai pengawas pihak manajemen, sehingga keberadaannya dapat mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan positif seperti pelaksanaan CSR dan pengungkapannya (Herawati, 2015). Dengan demikian adanya kepemilikan institusional dapat mendorong luasnya pengungkapan CSR.

Menurut penelitian Elvina, Makhdalena, & Trisnawati (2016); Wiyuda & Purnomo (2017) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Sedangkan menurut penelitian Cahyaningsih & Martina, (2011); Harjoto, Jo, & Kim, (2017); Herawati (2015) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan adalah proporsi dewan komisaris independen. Menurut UU PT No. 40 Tahun 2007 dewan komisaris adalah organ perseroan yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada dewan direksi. Dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan disebut sebagai dewan komisaris independen (Solikhah & Winarsih, 2016). Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan kontrol terhadap dewan direksi untuk mengungkapkan informasi yang lengkap (Suhardjanto, Utama, & Supriyono, 2013).

Menurut penelitian Isa & Muhammad (2015); Suhardjanto, Utama, & Supriyono (2013) dewan komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan sosial dan

lingkungan. Sedangkan menurut penelitian Susilo & Milldawati (2015); (Herawati, 2015) menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan adalah proporsi jumlah komite audit. Komite audit adalah organ dalam perusahaan yang bertugas untuk memberikan pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan, dan pengawasan internal didalam perusahaan. Komite audit juga bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk mengawasi perusahaan secara keseluruhan (Wiyuda & Purnomo, 2017). Oleh karena itu, keberadaan komite audit dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Rizki, Basri, & Musnadi, 2014).

Menurut penelitian Rachmanda & Fuad (2014); Wiyuda & Purnomo, (2017); Rizki et al., (2014) jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Sedangkan menurut penelitian Pratama & Rahardja (2013); Suhardjanto et al., (2013) jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Faktor keempat yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan adalah *leverage*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendek dan jangka panjang apabila perusahaan di likuidasi (Rizki et al., 2014). Perusahaan yang memiliki struktur modal dengan rasio *leverage* yang tinggi, berkewajiban untuk mengungkapkan informasi yang luas karena perusahaan menghadapi tuntutan dari *stakeholder* yang lebih banyak (Rindawati & Asyik, 2015).

Menurut penelitian Singhanian & Gandhi (2015); Bagus, Indra, Purba, & Yadnya (2015); Rizki et al. (2014); Wiyuda & Purnomo (2017) *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Sementara itu, menurut penelitian Elvina et al. (2016); Sembiring (2005) *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Faktor terakhir yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan CSR adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan laba atau keuntungan bagi para pemegang saham (Wiyuda & Purnomo, 2017). Menurut Subiantoro & Mildawati (2015), untuk melakukan kegiatan CSR diperlukan ketrampilan manajemen yang baik untuk menghasilkan laba, karena semakin tinggi laba, maka perusahaan akan memiliki kesempatan (*opportunity*) yang lebih besar untuk melakukan kegiatan CSR. Dengan demikian, tingkat profitabilitas dapat mendorong perusahaan untuk melakukan dan mengungkapkan CSR.

Hasil penelitian Herawati (2015); Rindawati & Asyik (2015); Solikhah & Winarsih (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh pada pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan hasil penelitian dari Singhania & Gandhi (2015); Suaryana & Febriana (2009); Sembiring (2005) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berdasarkan dari penelitian diatas, hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan memiliki hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai luas pengungkapan sosial dan lingkungan dengan variabel-variabel yang telah disebutkan sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti akan menguji pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah komite audit, dan *leverage* terhadap luas pengungkapan sosial dan lingkungan.

Teori Keagenan

Teori keagenan muncul untuk mengidentifikasi hubungan antara prinsipal (*shareholders*) dan agen (manajemen) (Jensen & Meckling, 1976). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah hubungan kontraktual antara pemegang saham (*prinsipal*) dengan pihak manajemen (*agent*). Agen dituntut untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan atas nama *prinsipal* dan mendapatkan delegasi wewenang untuk mengambil keputusan terkait dengan kegiatan operasional perusahaan.

Lebih lanjut lagi, Jensen & Meckling (1976) mengungkapkan bahwa permasalahan agensi yang dihadapi oleh perusahaan tidak hanya terjadi antara manajer dan pemegang saham akan tetapi juga terjadi antara manajer dengan pemberi pinjaman. Permasalahan ini muncul pada perusahaan yang memiliki hubungan dengan kreditur (pemberi pinjaman). Sehingga, perusahaan yang memiliki struktur modal dengan *leverage* yang tinggi akan menghadapi dua permasalahan agensi, yaitu dengan pemegang saham dan pemberi pinjaman.

Isu utama yang menjadi perhatian peneliti adalah adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Dalam hubungan keagenan, internal perusahaan (manajemen) memiliki keuntungan informasi (Barako, Hancock, & Izan, 2006). Oleh karena itu, pemilik menghadapi dilema karena mereka tidak dapat secara akurat mengevaluasi dan menentukan nilai dari keputusan yang dibuat. Dengan demikian, agen mengambil keuntungan dari kurangnya pengamatan pemilik yang terlibat dalam aktivitas untuk meningkatkan tujuan pribadinya.

Dalam rangka mengurangi konflik, agen dapat meningkatkan kualitas pelaporan

keuangan dengan cara mengoptimalkan kontrak antara pihak manajemen dengan pemegang saham, membuat kebijakan yang mengatur tentang pengungkapan berbagai informasi yang harus dilakukan perusahaan dan mengoptimalkan fungsi dari *intermediaries* (analisis keuangan dan lembaga pemeringkat) sebagai pengawas atau pengontrol atas pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Healy & Palepu, 2001).

Selain itu, adanya *agency problem* menimbulkan adanya *agency cost*, dalam rangka meminimalisasi adanya *agency cost* pihak manajemen dapat melakukan pengungkapan yang lebih banyak dengan tujuan meyakinkan para pemegang saham bahwa pihak manajemen tidak melakukan tindakan yang merugikan para pemegang saham. Dengan begitu, pengeluaran untuk biaya pengawasan dan *bonding cost* dapat diminimalisasi sehingga, *agency cost* juga akan berkurang.

Teori Ketersediaan Sumber Daya (*Resources Availability Theory*)

Resources availability theory merupakan teori yang mengidentifikasi hubungan antara performa ekonomi dengan pengungkapan sosial dan lingkungan (Kuzey & Uyar, 2016). Teori ini dikembangkan oleh Belkaoui & Karpik (1989) yang meneliti mengenai hubungan antara kinerja ekonomi perusahaan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

Belkaoui & Karpik (1989) mengidentifikasi bahwa dalam melakukan pengeluaran yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan perusahaan memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga, perusahaan harus memiliki aliran dana yang baik agar bisa membiayai pengeluaran yang terkait dengan kegiatan sosial dan lingkungan, atau yang kemudian disebut dengan istilah kinerja sosial.

Lebih lanjut lagi Belkaoui & Karpik (1989) mengidentifikasi bahwa kinerja sosial perusahaan juga berkaitan dengan performa ekonomi. Kinerja ekonomi yang bagus akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kinerja sosial, sehingga akan mendorong perusahaan untuk melaporkan kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan didorong oleh performa sosial dan ekonomi atau profitabilitas. Semakin bagus kinerja ekonomi sebuah perusahaan (semakin tinggi profitabilitas) maka semakin tinggi pula motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan karena mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan kegiatan sosial (Belkaoui & Karpik, 1989). Dengan demikian kinerja ekonomi diharapkan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau badan. Pemegang saham institusional merupakan investor yang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukan pengawasan, sehingga kepemilikan institusional dapat berfungsi sebagai pengawas tindakan manajemen (Karima, 2014).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam mengurangi *agency cost* karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan institusional merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang terkonsentrasi (Solikhah & Winarsih, 2016). Keberadaan investor institusional akan memotivasi pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak, termasuk informasi sosial dan lingkungan karena investor institusional sangat memperhatikan kualitas informasi yang diberikan oleh manajemen (Cahyaningsih & Martina, 2011).

Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Dewan komisaris termasuk dewan komisaris independen di dalamnya memiliki peran untuk memberikan pengawasan dan nasihat kepada pihak manajer terkait dengan kegiatan operasional agar sesuai dengan tujuan perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, keberadaan komisaris independen dapat menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh manajer melalui mekanisme pengawasan (Solikhah & Winarsih, 2016). Selain itu, keberadaan dewan komisaris independen juga akan meningkatkan keefektifan fungsi dewan komisaris di dalam perusahaan (Suhardjanto, Utama, & Supriyono, 2013).

Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Bersama-sama dengan dewan komisaris independen komite audit berperan dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Tetapi, lingkup pengawasan yang diawasi oleh komite audit lebih spesifik mengenai masalah akuntansi, laporan keuangan, dan sistem pengawasan internal. Komite audit bertanggung jawab atas kesesuaian laporan keuangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Lingkup pengawasan yang diawasi oleh komite audit lebih spesifik mengenai masalah akuntansi, laporan keuangan, dan sistem pengawasan internal (Wiyuda & Purnomo,

2017). Komite audit bertanggung jawab atas praktik laporan keuangan sehingga seluruh praktik penilaian, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suhardjanto et al., 2013).

Leverage

Leverage adalah proporsi total kewajiban terhadap ekuitas pemegang saham, sehingga rasio *leverage* dapat menggambarkan mengenai struktur modal di dalam perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi, mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki struktur modal dari kreditur yang lebih banyak.

Salah satu *proxy* yang digunakan untuk menghitung tingkat *leverage* adalah dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio DER menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Rasio DER membandingkan total utang dengan ekuitas secara keseluruhan. Perhitungan DER menghasilkan rasio yang komprehensif karena rasio DER membandingkan keseluruhan kewajiban perusahaan bukan hanya kewajiban jangka pendek atau jangka panjang saja (Subiantoro & Mildawati, 2015).

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba pada kurun waktu tertentu menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas, karyawan, modal, dan lain sebagainya (Harahap, 2008). Profitabilitas dapat diukur dengan rasio profitabilitas yaitu rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Hasil pengukuran ini dapat digunakan oleh para pemegang saham untuk menganalisis kinerja perusahaan selama periode tertentu.

Berdasarkan teori *resources availability*, untuk melakukan kegiatan sosial dan lingkungan serta melaporkan kegiatan tersebut, perusahaan memerlukan input sumber daya, terutama sumber daya uang (Kuzey & Uyar, 2016). Sehingga, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan sosial dan lingkungan serta mengungkapkan kegiatan tersebut (Kamil & Herusetya, 2012).

Pengungkapan Sosial dan Lingkungan (*Social and Environment Disclosure*)

Social and environment disclosure (pengungkapan sosial dan lingkungan) merupakan jenis pengungkapan sukarela. Pengungkapan sosial dan lingkungan biasanya diungkapkan secara terpisah dari laporan keuangan. Pengungkapan sosial dan lingkungan dilakukan un-

tuk memenuhi tuntutan pemerintah atas tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (Singhania & Gandhi, 2015).

Pengungkapan sosial dan lingkungan menjadi topik penelitian yang sering diteliti belakangan ini. *Social and environment disclosure* merupakan salah satu bentuk pengungkapan yang masuk dalam tema besar *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Hossain & Andrew, 2006). Pengungkapan sosial dan lingkungan mengungkapkan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggungjawab sosial dan lingkungannya.

Dalam mengukur pengungkapan sosial dan lingkungan terdapat beberapa indeks pengukuran. Salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur pengungkapan sosial dan lingkungan adalah GRI (*Global Reporting Initiative*). Selain GRI, belakangan ini juga dikembangkan indeks yang disebut *Social and Environment Disclosure Index* (SEDI) (Singhania & Gandhi, 2015). SEDI pertama kali dikembangkan oleh Hossain & Andrew (2006) di Bangladesh, kemudian dikembangkan lagi oleh Singhania & Gandhi (2015).

Social and Environment Disclosure Index (SEDI) merupakan salah indeks pengukuran yang dikembangkan untuk mengukur praktik pengungkapan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan. Sementara itu, GRI digunakan untuk mengukur praktik pengungkapan sosial dan lingkungan di dalam *Sustainability Reporting* (Global Reporting Initiative, 2016). Karena sebagian negara berkembang belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan melalui *Sustainability Reporting*, SEDI lebih sesuai untuk negara berkembang (Hossain & Andrew, 2006).

Pengungkapan Sosial dan lingkungan dimasing-masing negara memiliki keunikan sendiri-sendiri sehingga indeks pengukuran sosial dan lingkungan tidak bisa diterapkan secara universal pada semua negara yang berbeda-beda perkembangan ekonomi serta kepekaan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan (Hossain & Andrew, 2006). Sehingga indeks pengukuran pengungkapan sosial dan lingkungan harus didesain sesuai dengan kondisi perekonomian dan lingkungan dimana perusahaan berdiri.

Social and environmental disclosure index (SEDI) didesain untuk mengukur pengungkapan sosial dan lingkungan yang sederhana dan terintegrasi didalam laporan tahunan perusahaan (Singhania & Gandhi, 2015). Jika dibandingkan dengan GRI, SEDI memiliki indikator yang lebih sederhana. Sementara itu, GRI menggunakan indikator yang lebih spesifik seperti pengungkapan emisi, nilai ekonomi, pemakaian energi dan lain-lain.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap SEDI

Menurut teori agensi, kepemilikan institusional dapat mengurangi permasalahan agensi karena keberadaannya dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja manajer, karena investor institusional memiliki kemampuan dan kesempatan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan investor individu. Optimalisasi pengawasan ini akan mendorong pihak manajer untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada pemegang saham, termasuk pengungkapan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan keberadaan kepemilikan institusional dapat berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Hasil penelitian Elvina, Makhdalena, & Trisnawati (2016); Karima (2014); Wiyuda & Purnomo (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Sehingga, hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap SEDI

Menurut teori agensi, dewan komisaris independen dapat mengurangi permasalahan agensi karena keberadaan komisaris independen dapat menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh manajer melalui mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan ini akan mendorong pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Hasil penelitian Isa & Muhammad, 2015 ; Suhardjanto et al., 2013 menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Sehingga, hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan

Pengaruh Komite Audit terhadap SEDI

Menurut teori agensi, komite audit dapat mengurangi permasalahan agensi karena keberadaan komite audit dapat mengoptimalkan proses pengawasan terutama dalam hal penyampaian informasi kepada para pemegang saham. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk melakukan dan melaporkan kegiatan CSR. Sehingga komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan memuat informasi yang berkaitan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan keberadaan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sosial

dan lingkungan.

Hasil penelitian (Rachmanda & Fuad (2014); Rizki, Basri, & Musnadi (2014); Wi-yuda & Purnomo (2017) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Sehingga hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: *komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan*

Pengaruh *Leverage* terhadap SEDI

Menurut teori agensi, perusahaan yang memiliki struktur modal dengan *leverage* yang tinggi, akan menghadapi permasalahan agensi yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan pihak manajemen tidak hanya berhubungan dengan pihak pemegang saham, akan tetapi juga dengan pihak kreditur. Semakin bertambahnya permasalahan agensi, perusahaan dituntut untuk mengungkapkan informasi yang luas terutama yang berkaitan dengan kelangsungan usaha termasuk informasi sosial dan lingkungan. Dengan demikian, *leverage* diharapkan berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Hasil penelitian Rizki, Basri, & Musnadi (2014); Singhanian & Gandhi (2015); Wi-yuda & Purnomo (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Sehingga hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: *leverage berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan*

Pengaruh Profitabilitas terhadap SEDI

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba pada kurun waktu tertentu menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Harahap, 2008). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk menghasilkan *cash flow* berupa laba. Aliran kas masuk inilah yang menjadi sumber daya bagi perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya.

Menurut teori *resources availability*, untuk melakukan kegiatan sosial dan lingkungan serta melaporkan kegiatan tersebut, perusahaan memerlukan input sumber daya, terutama sumber daya uang. Sehingga, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan sosial dan lingkungan serta mengungkapkan kegiatan tersebut. Dengan demikian, profitabilitas diharapkan berpengaruh pada pengungkapan sosial dan lingkungan.

Hasil penelitian Herawati (2015); Rindawati & Asyik (2015); Solikhah & Winarsih

(2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Sehingga hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan

METODE

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2016. Pertimbangan memilih perusahaan property, real estate, dan konstruksi bangunan adalah karena perusahaan tersebut yang sesuai dengan fenomena permasalahan sosial dan lingkungan selama periode penelitian yakni tahun 2014-2016.

Teknik pengambilan sampel dari populasi menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut dan di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2016 tidak *delist* (keluar) dari Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian dari tahun 2014-2016 .
2. Perusahaan telah menyajikan laporan tahunan per 31 Desember untuk tahun 2014-2016 yang telah diaudit.
3. Tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan, karena penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas. Sehingga perusahaan yang mengalami kerugian harus dikeluarkan dari sampel.
4. Perusahaan yang menyediakan informasi terkait penelitian.

Variabel Penelitian

Pengungkapan Sosial dan Lingkungan

Pengungkapan sosial dan lingkungan didefinisikan sebagai tingkat luasnya pengungkapan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan melalui laporan tahunan (*annual report*). Dalam penelitian ini proxy yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan adalah *Social and Environment Disclosure Index* (SEDI), yang dikembangkan oleh Singhania & Gandhi (2015). SEDI terdiri dari 16 indikator dengan tema pengungkapan sosial dan lingkungan, sehingga total item yang harus diungkapkan berjumlah 16 item. Indikator-indikator yang digunakan dalam penilaian menggunakan SEDI adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Indikator Social and Environment Disclosure Index (SEDI)

Item	Deskripsi
Sertifikasi	Sertifikasi yang diterima oleh perusahaan, seperti ISO, dan penghargaan lain.
<i>Corporate Social Responsibility</i>	Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki lingkungan dan mensejahterakan masyarakat.
Pengungkapan tenaga kerja	Pengungkapan mengenai tenaga kerja beserta daftar gajinya secara lengkap.
Pengungkapan tingkat pendidikan pegawai	Pengungkapan daftar kualifikasi pendidikan pegawai yang bekerja di perusahaan.
Pengungkapan kesehatan dan keselamatan kerja	Pengungkapan mengenai sistem keselamatan yang ada di dalam perusahaan dalam rangka menciptakan keselamatan kerja.
Biaya pengembangan dan penelitian	Pengungkapan mengenai biaya pengembangan dan penelitian (<i>Research and Development</i>)
Pelatihan tenaga kerja	Pengungkapan mengenai pelatihan tenaga kerja yang telah dilakukan oleh perusahaan
<i>Fee audit</i>	Pengungkapan jumlah <i>fee</i> audit yang dibayarkan
Prospek perusahaan	Pengungkapan mengenai visi dan misi perusahaan kedepannya
Pengungkapan gaji dan kompensasi	Perincian gaji serta perbandingan antara gaji tertinggi dan terendah
Produk dan teknologi	Pengungkapan mengenai produk dan teknologi yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut
Penghargaan	Penghargaan yang diterima oleh perusahaan.
<i>Corporate Governance</i>	Pengungkapan mengenai tata kelola perusahaan serta komitmen untuk menciptakan <i>good corporate governance</i> .
Anak perusahaan	Pengungkapan mengenai anak perusahaan dan aktivitas sosialnya
Fasilitas dan tunjangan selain gaji yang diberikan kepada karyawan	Pengungkapan mengenai fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh karyawan selain gaji.
Kepedulian lingkungan	Pengungkapan mengenai aktivitas atau program yang dijalankan oleh perusahaan yang berkaitan

Sumber: (Singhania & Gandhi, 2015)

Adapun rumus untuk menghitung SEDI adalah sebagai berikut:

$$\text{SEDI} = (\sum \text{Item yang diungkapkan}) / (\text{Skor total pengungkapan})$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai proporsi saham yang dimiliki oleh institusi/badan (Karima, 2014). Kepemilikan institusional diproksikan dengan presentase saham yang dimiliki oleh institusi/badan. Adapun rumus untuk menghitung kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = (\sum \text{saham yang dimiliki institusi}) / (\sum \text{Saham yang beredar})$$

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen di definisikan sebagai proporsi dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan dari seluruh anggota dewan komisaris perusahaan (Suhardjanto, Utama, & Supriyono, 2013). Dewan komisaris independen diproksikan dengan presentase dewan komisaris independen di dalam perusahaan. Adapun rumus untuk menghitung proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{(\sum \text{dewan komisaris independen})}{(\sum \text{dewan komisaris})} \times 100\%$$

(Suhardjanto et al., 2013)

Komite Audit

Komite audit didefinisikan sebagai jumlah anggota komite audit yang ada di dalam perusahaan (Rizki, Basri, & Musnadi, 2014). Komite audit di proksikan dengan menggunakan jumlah seluruh anggota komite audit. Adapun rumus untuk menghitung komite audit adalah sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{anggota komite audit}$$

Leverage

Leverage dapat didefinisikan sebagai tingkat ketergantungan suatu perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan perusahaan (Subiantoro & Mildawati, 2015). *Leverage* diproksikan dengan total kewajiban dibagi dengan total ekuitas pemegang saham. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{(\text{Total Hutang})}{(\text{Total Ekuitas})}$$

Profitabilitas

Profitabilitas didefinisikan sebagai perbandingan antara laba dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (Subiantoro & Mildawati, 2015). Profitabilitas diproksikan dengan *return on asset* (ROA). Adapun rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{(\text{Laba bersih setelah pajak})}{(\text{Total Aset})}$$

Teknik Analisis Data

Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi linier berganda, yakni pengujian regresi yang menggunakan lebih dari satu prediktor (variabel independen).

Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Dimana:

Y = pengungkapan sosial dan lingkungan

α = konstanta

β = koefisien regresi

X1= kepemilikan institusional

X2= proporsi dewan komisaris independen

X3= jumlah komite audit

X4= *leverage*

X5= profitabilitas

e = *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistika Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Statistika Deskriptif

	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
SEDI	.38	1.00	.7573	.16430
Kepemilikan Institusional	.17	.67	.3750	.10458
Komisaris Independen	.21	.95	.6489	.18469
Komite Audit	2.00	6.00	3.0250	.49302
Leverage	.06	5.37	1.0182	.87475
Profitabilitas	.00	.36	.0662	.05611

Sumber: Data diolah, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata kepemilikan institusional perusahaan yang menjadi sampel adalah 0,6489. Data kepemilikan institusional memiliki standar deviasi 0,18469. Nilai kepemilikan institusional paling rendah adalah 0,21 nilai tertinggi yakni 0,95.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata Dewan Komisaris Independen perusahaan yang menjadi sampel adalah 0,3750 atau sebesar 37,5%. Data dewan komisaris independen memiliki standar deviasi 0,10458. Nilai dewan komisaris independen yang paling rendah yakni 0,17, sedangkan nilai dewan komisaris yang tertinggi yakni 0,67.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah anggota komite audit perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan adalah 3 orang. Data komite audit memiliki standar deviasi 0,493. Nilai komite audit yang paling rendah yakni sebesar 2 sedangkan nilai komite audit yang tertinggi sebesar 6.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata *leverage* perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan adalah 1,0182 atau sebesar 101,82%. Data *leverage* memiliki standar deviasi 0,87475. Nilai *leverage* yang paling rendah yakni sebesar 0,06 sedangkan nilai *leverage* yang tertinggi sebesar 5,37.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata profitabilitas perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan adalah 0,663 atau sebesar 66,3%. Data profitabilitas memiliki standar deviasi 0,5611. Nilai profitabilitas yang paling rendah yakni sebesar 0,00 sedangkan nilai profitabilitas yang tertinggi sebesar 0,36.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata Social and *Enviromental Disclosure Index* perusahaan yang menjadi sampel adalah 0,7573 atau sebesar 75,73%. Data Social and *Enviromental Disclosure Index* memiliki standar deviasi 0,16430. Nilai Social and *Enviromental Disclosure Index* yang paling rendah yakni sebesar 0,38 sedangkan nilai Social and *Enviromental Disclosure Index* yang tertinggi sebesar 1,00.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3
Hasil Uji Asumsi Klasik

Asumsi	Signifikansi	Keputusan
Normalitas	0,200	Normal
Autokorelasi	0,271	Tida ada gejala autokorelasi
Multikolinieritas	KI: 1,117; DKI: 1,018; KA: 1,097; Lev: 1,226; Prof: 1,062	Tidak ada gejala Multikolinieritas
Heteroskedastisitas	KI: 0,396; DKI: 0,363; KA: 0,315; Lev: 0,180; Prof: 0,459	Tidak ada gejala heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik, sehingga layak untuk dilanjutkan ke dalam analisis regresi linier berganda.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	P-Value	Keputusan
A	,682	-	-
Kepemilikan Institusional	-,034	,003	Signifikan
Komisaris Independen	,062	,116	Tidak Signifikan
Komite Audit	-,015	,004	Signifikan
Leverage	-,012	,000	Signifikan
Profitabilitas	-,096	,276	Tidak Signifikan
F		0,000	Berpengaruh simultan
Adj. R-Squared		0,391	Mampu menjelaskan 39,1%

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, model regresi ini telah memenuhi kriteria uji ketepatan model yakni nilai signifikansi uji F yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka dapat dibuat rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,682 - 0,206 \text{ KI} - 0,184 \text{ DKI} + 0,074 \text{ KA} + 0,070 \text{ Lev} - 0,241 \text{ Prof} + e$$

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap SEDI

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 0,003. Nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional kurang dari 0,05, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan dengan arah negatif.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Elvina, Makhdalena, & Trisnawati (2016); Wiyuda & Purnomo (2017) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan, tetapi arah pengaruh dalam penelitian ini bertanda negatif. Penelitian ini mendukung penelitian Sukasih & Sugiyanto (2017) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan dengan arah negatif.

Menurut teori agensi, kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk mengurangi adanya permasalahan agensi, sehingga kepemilikan institusional diharapkan

memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Hal ini disebabkan karena investor institusional memiliki sumber daya yang lebih baik dari investor individu sehingga dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan (Karima, 2014). Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi karena kepemilikan institusional dalam penelitian ini memiliki pengaruh dengan arah negatif.

Menurut Sukasih & Sugiyanto (2017) investor institusional memiliki fokus utama dalam mencari laba pengembalian yang akan didapatkan dari hasil investasinya di perusahaan, sehingga pengungkapan mengenai informasi sosial dan lingkungan kurang diperhatikan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki konsentrasi kepemilikan institusional yang tinggi justru mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan yang sedikit.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap SEDI

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel dewan komisaris independen adalah sebesar 0,116. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak signifikan mempengaruhi variabel pengungkapan sosial dan lingkungan.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Isa & Muhammad (2015); Suhardjanto, Utama, & Supriyono (2013) yang mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Herawati (2015); Susilo & Milldawati (2015), yang mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Dalam teori agensi, keberadaan dewan komisaris independen dapat menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh manajer melalui mekanisme pengawasan, serta mendorong pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi yang luas (Suhardjanto, Utama, & Supriyono, 2013). Sehingga, dewan komisaris diharapkan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi karena hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Menurut Susilo & Milldawati (2015) dewan komisaris independen memiliki peran untuk mengawasi dan memberikan saran kepada dewan direksi termasuk saran untuk melakukan kegiatan sosial dan lingkungan, akan tetapi keputusan untuk melakukan kegiatan

sosial dan lingkungan tetap berada di tangan dewan direksi. Dengan kondisi yang demikian, dewan komisaris independent tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

Pengaruh Komite Audit terhadap SEDI

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel komite audit adalah sebesar 0,004. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Pratama & Rahardja (2013); Suhardjanto et al., (2013) yang mengungkapkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rachmanda & Fuad (2014); Wiyuda & Purnomo, (2017); Rizki et al., (2014) yang mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Dalam teori agensi, keberadaan komite audit dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan karena komite audit mempunyai tugas secara spesifik terhadap proses akuntansi dalam perusahaan (Wiyuda & Purnomo, 2017). Sehingga, menurut teori agensi komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi karena komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Adanya pengaruh komite audit terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan menunjukkan bahwa komite audit memiliki peran dalam mengawasi dan mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi yang luas (Iswandika et al., 2014). Dengan demikian, komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Pengaruh *Leverage* terhadap SEDI

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel *leverage* adalah sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Elvina et al. (2016); Sembiring (2005) yang mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

sosial dan lingkungan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Singhanian & Gandhi (2015); Bagus, Indra, Purba, & Yadnya (2015); Rizki et al. (2014); Wiyuda & Purnomo (2017) yang mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Berdasarkan teori agensi *leverage* akan berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan, karena perusahaan yang memiliki struktur modal dengan *leverage* yang tinggi akan mengalami permasalahan agensi yang lebih banyak, sehingga perusahaan perlu untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas (Rindawati & Asyik, 2015). Hasil penelitian ini mendukung teori agensi karena dalam penelitian ini *leverage* terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Menurut Maiyarni et al., (2014) perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk mengurangi permasalahan agensi yang mereka hadapi. Permasalahan agensi yang dihadapi oleh perusahaan dengan struktur *leverage* yang tinggi lebih banyak daripada perusahaan yang tidak memiliki *leverage*, karena perusahaan yang memiliki struktur *leverage* yang tinggi juga mendapat tuntutan pengungkapan informasi dari kreditor.

Pengaruh Profitabilitas terhadap SEDI

Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel profitabilitas adalah sebesar 0,276. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Herawati (2015); Rindawati & Asyik (2015); Solikhah & Winarsih (2016) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Singhanian & Gandhi (2015); Suaryana & Febriana (2009); Sembiring (2005) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Dalam *resources availability theory*, perusahaan memerlukan sumber daya yang cukup untuk melakukan kegiatan sosial dan lingkungan sehingga perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan yang lebih banyak (Kuzey & Uyar, 2016). Menurut *resources availability theory* profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan, akan tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung teori tersebut karena hasil dari penelitian

ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.

Menurut Subiantoro & Mildawati (2015) perusahaan cenderung mengalokasikan laba yang dimiliki untuk berinvestasi dalam rangka memperbesar operasi usaha seperti membangun gedung dan membeli peralatan, sehingga perusahaan tidak memperhatikan kegiatan serta pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Dengan demikian perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi tidak selalu mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan yang luas. Hal ini terbukti dalam penelitian ini.

PENUTUP

Simpulan

Sebagai bentuk pengelolaan perusahaan yang berpijak pada *triple bottom line* (*planets, people and profit*), maka selain mencari keuntungan perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan. *Corporate social responsibility* merupakan program perusahaan untuk mengaplikasikan *triple bottom line* tersebut. Program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat dilihat dari pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada annual report. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan kinerja sosial dan lingkungannya. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional, komite audit dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Sedangkan proporsi dewan komisaris dan profitabilitas tidak dapat mempengaruhi pengungkapan sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, I., Indra, G., Purba, W., & Yadnya, P. (2015). Pengaruh ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility*. *Manajemen Unud*, 4(8), 2428–2443.
- Barako, D. G., Hancock, P., & Izan, H. Y. (2006). Factors Influencing voluntary corporate disclosure by Kenyan companies. *Corporate Governance*, 14(2), 107–125.
- Belkaoui, A., & Karpik, P. G. (1989). Determinants of the corporate decision to disclose social information. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 2(1), 36–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/JEIM-07-2014-0077>
- Cahyaningsih, & Martina, V. Y. (2011). Pengaruh mekanisme corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. *Siasat Bisnis*, 15(2), 171–186.

- CSR Indonesia. (2016). Catatan “Global CSR Summit & Awards 2016.” Diambil 6 Februari 2018, dari <http://csr-indonesia.com/2016/05/28/catatan-global-csr-summit-awards-2016/>
- Elkington, J. (1998). Partnerships from cannibals with forks: The triple bottom line of 21st-century business. *Environmental Quality Management*, 8(1), 37–51. <https://doi.org/10.1002/tqem.3310080106>
- Elvina, N., Makhdalena, & Trisnawati, F. (2016). Analisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, *leverage*, terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI). *JOMFKIP*, 3(2), 1–15.
- Global Reporting Initiative. (2016). About GRI. Diambil 6 Februari 2017, dari <https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx>
- Harahap, S. S. (2008). *Analisis kritis atas laporan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harjoto, M., Jo, H., & Kim, Y. (2017). Institutional ownership and *Corporate Social Responsibility* The non-linear relation and its implication for stock return volatility Institutional ownership and *Corporate Social Responsibility* The non-linear relation and its implication for stock return vo, 1–67. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2664437>
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry , corporate disclosure , and the capital markets : A review of the empirical disclosure literature \$, 31, 405–440.
- Herawati, H. (2015). Corporate governance , karakteristik perusahaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, 2(2).
- Hossain, M., & Andrew, J. (2006). Corporate social and environmental disclosure in developing countries : evidence from Bangladesh. (October).
- Isa, M. A., & Muhammad, S. (2015). The impact of board characteristics on *Corporate Social Responsibility* disclosure: evidence from Nigerian food product firms. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 1(12), 34–45. <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.112.1004>
- Iswandika, R., Murtanto, & Sipayung, E. (2014). Pengaruh kinerja keuangan, corporate governance, dan kualitas audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *E-journal Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 1(2), 1–18.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>

- Kamil, A., & Herusetya, A. (2012). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* disclosure. *Media Riset Akuntansi*, 2(1), 1–17.
- Karima, N. (2014). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. *Widya Warta*, 38(2), 219–230.
- Kuzey, C., & Uyar, A. (2016). Determinants of sustainability reporting and its impact on firm value : evidence from the emerging market of Turkey. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.153>
- Maiyarni, R., Susfayetti, & Erwati, M. (2014). Pengaruh profitabilitas laporan perusahaan likuiditas dan *leverage* terhadap pengungkapan corporate sosial responsibility (CSR) pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 6(1), 79–94.
- Center for Sustainability Reporting. (2016). Sustainability Reporting Award 2016 – Press Release. Diambil 6 Februari 2018, dari <http://sra.ncsr-id.org/sustainability-reporting-award-2016-press-release/>
- Pratama, A. G., & Rahardja. (2013). Pengaruh good corporate governance dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan (Studi empiris pada perusahaan manufaktur dan tambang yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Termasuk dalam PROPER tahun 2009-2011). *Diponegoro*, 2(3), 1–14.
- Rachmanda, A., & Fuad. (2014). Analisis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan (Studi empiris perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–12.
- Rindawati, W. M., & Asyik, F. N. (2015). Kepemilikan publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Jurnal Ilmu dan riset Akuntansi*, 4(6), 1–15.
- Rizki, L. A., Basri, H., & Musnadi, S. (2014). Pengaruh faktor fundamental dan mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan corporate sosial responsibility pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 3(3), 35–45.
- RobecoSAM. (2016). *Country Sustainability Ranking Update*.
- Sembiring, E. R. (2005). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial: Studi empiris pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Symposium Nasional Akuntansi VIII*, (September), 15–16.

- Singhania, M., & Gandhi, G. (2015). Social and environment disclosure index: perspectives from indian corporate sector. *Journal of Advances in Management Research*, 12(2), 192–208.
- Solikhah, B., & Winarsih, A. M. (2016). Pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 13(1), 1–22.
- Suaryana, A., & Febriana. (2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, 1–20.
- Subiantoro, O. H., & Mildawati, T. (2015). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. 4(9). 1–21.
- Suhardjanto, D., Utama, W. B., & Supriyono. (2013). Peran corporate governance dalam pengungkapan sosial dan lingkungan: Studi empiris Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. 10(1). 93–113.
- Sukasih, A., & Sugiyanto, E. (2017). Pengaruh struktur good corporate governance dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 2(2). 121–131.
- Susanto, P. B., & Subekti, I. (2012). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan (Pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, vol 1.
- Susilo, M. S., & Milldawati, T. (2015). Pengaruh good corporate governance terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Ilmu dan riset Akuntansi*, 4(5), 1–16.
- Wiyuda, A., & Purnomo, H. (2017). Pengaruh good corporate governance, karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan terdaftar di BEI. *Kompartemen*, 15(1), 12–26.